

**REFORMASI KALURAHAN UNTUK KEMANDIRIAN DESA  
DI KALURAHAN GIRIKERTO KECAMATAN TURI KABUPATEN  
SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Disusun Oleh:**

**MOH YAZID S HASI**

**19520086**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
2023**

REFORMASI KALURAHAN UNTUK KEMANDIRIAN DESA  
DI KALURAHAN GIRIKERTO KECAMATAN TURI KABUPATEN

SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2023



## HALAMAN PENGASAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Hari : Selasa  
Tanggal : 01 Agustus 2023  
Waktu : 12:30 - Selesai  
Tempat : Ruang Rektor

### TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si

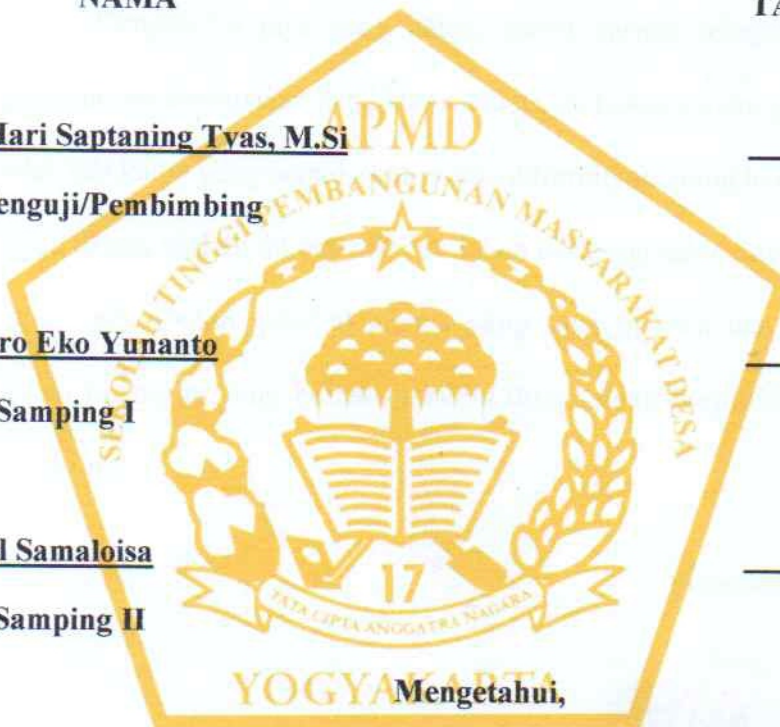
Ketua Penguji/Pembimbing

Dr. Sutoro Eko Yunanto

Penguji Samping I

Dr. Rijel Samaloisa

Penguji Samping II



TANDA TANGAN

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Rijel Samaloisa)

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Moh Yazid S Hasi

NIM : 19520086

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya sendiri dan swepanjang pengetahuan saya juga tidak ada karya yang pernah ditulis atau ditrerbitkan orang lain kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. Saya bersedia menerima: sanksi pencabutan gelar akademis yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari adanya plagiat di dalam skripsi ini.

Yogyakarta 09 Agustus 2023

Yang bertanda tangan



Moh Yazid S Hasi

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur dengan mengucapkan alhamdulillah sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Smoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak dan teruntuk penulis pribadi dan pembaca lainnya.

Terimakasih atas segala canda dan tawa maupun pikira-pikiran yang membuka cakralla npenulis bisa terbuk dari tman-tman seperjuangan dalam menemani penyusunan skripsi ini. Terimakasih Abang Sarifudin Bin La Kuma atas segala masukan-masukanya, kepada bang Maman yang selalu menemanmi penulisan skripsi ini dan juga terimakasih kepada bang Askal, mas Boy Kurniawan, dan adik adik lainnya juga Ramdan Azier dan Igo Dermawan atas kebersamaan tman-trman semua. Terimakasih yang sebesar-bernya juga kepada kawan-kawan seangkatan yang selalu berdiskusi tentang penyelesaian skripsi Bersama-sama.

## **MOTO**

“Tidak Ada Dua Hal Yang Di Digabungkan Lebih Baik Daripada Pengetahuan  
Dan Kesabaran”

(Rasulullah Muhammad Saw)

“Angina Tidak Berhembus Untuk Menggoyangkan Pepohonan, Melainkan  
Menguji Kekuatan Akarnya”

(Ali Bin Abu Thalib)

“Jika Kamu Tidak Sanggup Menahan Perihnya Belajar, Maka Kamu Harus  
Menahan Perihnya Kebodohan”

(Imam Syafi'i)

“Belajar Tanpa Doa Itu Sombong, Berdoa Tanpa Usaha Itu Bohong, Maka Belajar  
Dan Berdoalah Dengan Di Barengi Usaha Yang Gigih Maka Hasil Tidak Akan  
Menghianatimu”

(Moh Yazid S Hasi)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah untuk mengawali rasa syukur saya kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan rahmat dan ridhoNya peneliti diberikan kesempatan dengan kesehatan yang cukup untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini. Penelitian ini peneliti susun untuk memenuhi salah satu dari syarat pencapaian gelar Sarjana di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penyelesaian tugas akhir ini (Skripsi) tidak terlepas dari support dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu memberikan arahan-arahan dan masukan-masukan untuk bisa menyelesaikan dengan konsep yang bisa membawa perkembangan Ilmu Pengetahuan di Era perkembangan Desa yang semakin berkompetisi memajukan Desa. Olehnya itu penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terlebih khusus penulis sampaikan rasa hormat dan rasa hormat saya sekaligus terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Dra B. Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku pembimbing Skripsi
4. Para dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
5. Lurah Girikerto beserta seluruh pamong kalurahan
6. Ketua BPKal Girikerto serta masyarakat yang ada di Kalurahan Girikerto
7. Keluarga besar di kampung tempat tanah dodomi saya yang selalu menjadi sumber inspiratif dan semangat untuk terus berjuang dan berusaha menyelesaikan Skripsi Ini

8. Abang-abang saya di tempat saya ditimpa rumah yang sederhana di jogjakarta
9. Teruntuk teman dan sahabat saya yang selalu menemani dalam menyusun Skripsi

Pada akhirnya penulis juga bisa menyelesaikan tugas akhir dengan keringat dan kerja keras dengan di bantu memberikan arahan dan masukan sekali lagi saya ucapkan terimakasih. Harapan besar penulis karya tulis ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan untuk diri penulis sendiri dalam membenah diri untuk berbakti pada Nusa Ina.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
INTISARI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Fokus Penelitian .....	10
F. Literatur Review .....	11
G. Kerangka Konseptual.....	17
1. Kemandirian Desa.....	17
2. Reformasi Pemerintahan.....	20
a. Rekognisi dan subsidiaritas.....	23
b. Emansipasi Desa. ....	25
c. Redistribusi Dana Istimewa (DAIS) .....	26
d. Demokratisasi.....	27
e. Teknologi Tepat Guna .....	28
H. Metode Penelitian .....	29
1. Jenis Penelitian .....	29
2. Unit Analisis .....	30
3. Teknik Pengumpulan Data.....	31
4. Teknik Analisis Data .....	34
BAB II PROFIL KALURAHAN GIRIKERTO .....	35
A. Sejarah Kalurahan Girikerto .....	35
B. Kondisi Geografis Kalurahan Girikerto .....	36
C. Kondisi Demografi.....	37

1. Jumlah Penduduk:.....	38
2. Keadaan Sosial Kalurahan Girikerto .....	41
3. Keadaan Ekonomi.....	43
D. Kelembagaan.....	47
1. Lembaga Pemerintah Kalurahan.....	48
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal).....	49
3. Lembaga Desa.....	51
E. Visi dan Misi Kalurahan Girikerto .....	57
F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikerto Tahun ...	61
<b>BAB III REFORMASI KALURAHAN UNTUK KEMANDIRIAN DESA ..</b>	<b>64</b>
A. Governabilitas Pemerintah Kalurahan dalam menjalankan Asas Rekognisi dan subsidiaritas .....	66
B. Emansipasi Desa/Kalurahan.....	74
C. Redistribusi dana istimewa dari Pemerintah Provinsi DIY Kepada Kalurahan Girikerto .....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	87
Daftar Pustaka .....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	viii

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Subyek Penelitian.....	31
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	38
Tabel. 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian .....	39
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	41
Table 2.4 Fasilitas Perekonomian .....	46
Table 2.5 Potensi Ekonomi .....	47
Tabel 2.6 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.....	51
Tabel 2.7 Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga .....	54
Tabel 2.8 Struktur Organisasi Karang Taruna .....	55
Tabel 2.9 Pengurus BUMKal Girikerto .....	56
Tabel 3.1 Klasifikasi Pemerintah .....	65

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kalurahan Girikerto .....	36
Gambar 1.2 Struktur Pemerintahan Kalurahan Girikerto .....	49
Gambar 1.3 Badan Permusyawaratan Kalurahan Girikerto .....	50
Gambar 1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikerto .....	62

## INTISARI

Skripsi ini membahas tentang reformasi kalurahan untuk kemandirian desa di kalurahan Girikerto. Girikerto di satu beberapa tahun terakhir ini cukup banyak mendapatkan berbagai macam penghargaan dari prestasi-prestasi yang didapatkannya, mulai dari menjadi Desa Mandiri Budaya Terbaik di Tahun 2022 dan juga meraih prestasi kedua dari penyelenggaraan pemerintahan yang unggul di segala bidang di tahun 2023 dan pemerintah Girikerto mendapatkan peringkat kedua. Olehnya itu peneliti mencoba mendudukan dimana letak perubahan yang terjadi di kalurahan Girikerto, bagaimana reformasi kalurahan dilakukan untuk mencapai Kemandirian Desa? Dan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Kalurahan Girikerto untuk mencapai Kemandirian desa?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif-deskriptif* dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan beberapa teknik ini membantu penulis dalam mendapatkan informasi dan data-data yang bisa dijadikan sebagai basis analisis data penelitian, kemudian peneliti menarasikan dan mengkontruksi data yang telah didapatkan.

Peneliti mencoba menarasikan Reformasi Kalurahan Girikerto untuk Kemandirian Desa mulai asas Asas Rekognisi dan Subsidiaritas, Emansipasi, hingga Redistribusi Dana Istimewa yang dilihat dari sudut pandang *Governability* yaitu dari segi otoritas dan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah kalurahan Girikerto. penemuan dalam penelitian ini adalah: (1). Dalam penyelenggaran pemerintahan kalurahan, otoritas dan kapasitas pemerintah kalurahan dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, pemerintah sudah memiliki beberapa ruang yang bisa digunakan kewenangannya secara penuh seperti halnya dalam bidang pergulatan pemerintah kalurahan bersama masyarakat setempat yang di bangun dengan pola relasi yang baik. Namun belum dibidang yang lainnya karena peran dari atas sangat besar sehingga apa yang menjadi prakarsa dan gagasan yang ada di kalurahan dalam menggunakan tanah kas desa, masih terjadi benturan dengan regulasi-regulasi dari LP2B kabupaten. (2). Pemerintah kalurahan selalu menggeluti pergerakannya dalam 5 Arus pembangunan yang kemudian penulis sebut 5A, yaitu Arus jalan, Arus air, Arus listrik, Arus Distribusi dan Arus pengetahuan dan edukasi. ini senada dengan asas rekognisi, subsidiaritas dan emansipasi desa yang termaktub dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan yang (3). Pemerintah kalurahan sangat terbantu dengan adanya redistribusi dana istimewa dari pemerintah DIY dalam meningkatkan potensi-potensi yang ada di Girikerto.

Kata Kunci: Reformasi, Governabilitas Pemerintah, Kemandirian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa atau yang dikenal juga sebagai Kalurahan merupakan mata rantai dari sistem pemerintahan nasional dan menjadi pemerintahan terdekat dan terdepan yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama. Tercapainya tujuan Negara sangat ditentukan oleh keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk membangun basis yang kuat bagi demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan pembangunan sekaligus mewadahi kepentingan masyarakat lokal yang berbeda-beda.

Upaya perbaikan desa dilakukan ketika isu mengenai desa mulai dibahas dalam majalah-majalah terkemuka seperti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan media Prisma sejak tahun 1976. Permasalahan yang diangkat diantaranya, otonomi desa, pembangunan desa, hingga kemiskinan dan keterbelakangan desa. (Eko, 2014).

Pada saat yang sama pembangunan desa terus dicanangkan sebagai ikon Orde Baru semenjak disahkannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa yang membangun sarana-sarana fisik di desa seperti dibidang pendidikan, membangun Sekolah Dasar Inpres (SDI), dibidang ekonomi membangun Koperasi Unit Desa (KUD) dan pasar desa (Pemerintah Indonesia. 1979). Dengan disahkannya UU tersebut telah mengubah paradigma masyarakat

secara signifikan mengenai desa dan mobilitas sosial orang desa, hal ini ditandai dengan wajah desa yang semakin membaik, status dan kemakmuran orang desa semakin meningkat namun belum memadai transformasi desa secara keseluruhan seperti struktur dan institusi pada negara, daerah, birokrasi maupun desa tidak mengalami perubahan besar (Eko, 2005).

Kehadiran UU No. 22 Tahun 1999 menjiwai spirit baru di desa karena salah satu pertimbangan UU ini menegaskan bahwa UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang menyeragamkan nama, susunan, bentuk dan kedudukan pemerintahan desa tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 karena perlunya mengakui dan menghormati hak asal usul daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu di ganti dengan pengaturan yang menjadikan desa dapat berdaulat dengan otonominya dan kerugiannya juga demokrasi yang ada di desa. Olehnya itu jika dirumuskan Di masa Orde Baru, ada tiga wacana dalam membangun desa yang dibangun dengan cara paralel dan sentralistik dan dibungkus dalam program besar yang dikenal dengan revolusi hijau (Farid, 2017).

*Pertama*, kombinasi modernisasi desa dengan pembangunan desa yang dibingkai dalam spirit Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Disisi lain juga ketahanan sosial desa dibangun. Ketahanan sosial dibangun semacam ada motif trauma masa lalu di periode sebelumnya, di mana desa itu rentan menjadi arena konflik politik sehingga ketahanan desa

pada saat itu sebagai sebuah upaya untuk memulihkan kondisi yang tadinya lebih konflikktual menjadi tenteram dan damai, sehingga kegiatan-kegiatan partisipasi pembangunan dari rumah tangga (RT), karang taruna, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi bagian penting yang dikuatkan untuk memperkuat ketahanan sosial desa dan gotong royong maupun swadaya yang dimobilisasi juga untuk ketahanan sosial desa.

*Kedua*, upaya modernisasi di desa agar membawa perubahan dari desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Desa Swasembada adalah desa yang mampu memenuhi dirinya sendiri. Ini adalah upaya memodernisasi desa supaya mengalami perubahan dari status desa swadaya, swakarya atau bisa berkarya sendiri, menjadi desa swasembada. Di tahun 1980an proyek ini relatif berhasil karena desa swasembada menjadi tujuan terakhir atau tujuan pamungkas dari pembangunan desa pada saat itu.

*Ketiga*, inpres desa sebagai pendobrak swadaya masyarakat lokal dalam pembangunan desa dan pembiayaan terhadap pemerintah desa. Namun semua upaya ini tidak membawa kembali otonomi desa seutuhnya kepada desa melainkan lebih melayani pemerintah pusat dan menjalankan proyek-proyek ataupun program-program yang datang dari atas sesuai yang disampaikan oleh Prof. Selo Soemardjan (Eko, 2017:47).

Di era reformasi, wacana dan pola yang digunakan tidak jauh berbeda dan yang membedakannya hanyalah sistem main dan perubahan istilah, namun tolak ukur yang digunakan masih menggunakan standar-standar teknokratik



dengan menyibukkan pemerintahan desa lebih banyak mengurus pendataan daripada Realita sesungguhnya yang dihadapi oleh masyarakat.

Desa dijadikan sebagai ladang perlombaan yang muaranya adalah untuk mencapai kemandirian desa. Desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri adalah proyek dan nama lain yang digunakan oleh pemerintahan di awal-awal reformasi yang diberi slogan desa membangun. Namun menimbulkan kekakuan yang dialami oleh desa untuk mencapai kemandirian yang sejati. Hingga perjuangan dilakukan oleh kalangan akademisi dan para politisi untuk membentuk Undang-undang baru yang mengatur kejelasan dan kedudukan desa bisa lebih jelas. Di tahun 2014 perumusan itu kemudian disahkan dan desa diberikan kewenangan untuk menentukan sikap dan kepentingannya sesuai potensi yang dimiliki desa.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan desa sebagai subyek pembangunan dan bukan lagi sebagai objek pembangunan yang harus mengurus dan mengembangkan sistem pelayanan yang baik terhadap masyarakat sampai memajukan kesejahteraan rakyat dari kemandirian yang dicapai oleh desa. Seperti halnya dalam pasal 3 huruf a dan b UU No. 6 Tahun 2014 memberikan semangat baru yang menjiwai perjuangan dan upaya memandirikan desa, yaitu dengan asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Rekognisi adalah mengakui dan menghormati. Artinya pengakuan dan penghormatan pada tatanan, organisasi, pranata, dan kearifan lokal yang sudah ada. Sedangkan subsidiaritas adalah penetapan kewenangan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala desa sehingga supra desa tidak perlu mengintervensi atas kewenangan yang telah ditetapkan bagi desa. Seharusnya supra desa memberikan dukungan finansial, fasilitas, pembinaan, dan supervisi untuk menjamin agar penyelenggaraan kewenangan tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa, juga keadilan sosial, dan ini sesuai dengan amanat konstitusi dalam Pasal 18 B ayat (2) (Triputra, 2019). Ini tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan kemandirian.

Istilah kemandirian (*resilience*) sering dipersamakan dengan otonom yang artinya adalah mampu berdiri di kaki sendiri tanpa bergantung pada siapapun dan memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan yang menguntungkan bagi keberlanjutan hidup (Amalia, 2015). Ini sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya tonggak politik dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dalam ruang lingkup ekonomi.

Tumbuh dan berkembangnya kemandirian desa juga tidak terlepas dari terealisasinya emansipasi desa. Emansipasi merupakan persamaan hak dan pembebasan dari dominasi yang menjadikan desa sebagai subyek (penyangga hak dan kewajiban) pemberi manfaat dan sebagai partner dalam membangun harkat dan martabat rakyat. Oleh karena, desa harus memiliki kebebasan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan menjalankan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prakarsa lokal yang berskala desa dan hak asal usul. Perwujudan kemandirian desa ini bisa terwujud jika asas rekognisi dan subsidiaritas mampu diberikan secara penuh kepada desa.

Karena dengan asas tersebut desa bukanlah sebagai subordinat dari pemerintah supra desa melainkan sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Daerah istimewa Yogyakarta adalah daerah yang selalu memperhatikan nasib orang-orang di desa/kalurahan. Dalam perjalanannya, untuk mencapai kemandirian desa, maka harus dicapai dalam Desa Mandiri Budaya (DMB) melalui 4 pilar indikator kemandirian yaitu: *Pertama* Desa Budaya, merupakan desa yang mengaktualisasikan mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan budaya yang dimilikinya. Potensi yang dimiliki dari adat, tradisi, permainan tradisional, Bahasa, sastra, kerajinan, aksara, penataan ruang, kesenian, pengobatan tradisional, dan warisan warisan budaya lainnya. *Kedua* Desa Wisata, merupakan desa yang masyarakatnya memiliki kelompok-kelompok usaha dalam bidang pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung di dalam wahala desa dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat. *Ketiga* Desa Prima, merupakan desa yang memiliki kemampuan dalam meningkatkan partisipasi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi berbasis potensi yang digerakan dengan kolaborasi antar sektor untuk mewujudkan keluarga sejahtera. *Ke Empat* Desa Preneur, merupakan desa yang memiliki kemampuan dalam menumbuhkan unit-unit usaha berskala desa. Warga desa adalah penggerak wirausaha dari keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga. Sehingga peningkatan mutu produk dan jasa punya nilai tambah dan daya saing yang bermuara pada peningkatan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan (Supardal, 2022).

Peraturan Gubernur (PERGUB) DIY Nomor 93 Tahun 2020 tentang desa/kalurahan mandiri budaya Pasal 3 menjelaskan bahwa desa mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program atau kegiatan desa budaya, desa wisata, desa prima, dan desa preneur. Status desa mandiri budaya adalah prestasi tertinggi dari desa yang menjadikan desa lebih mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam kehidupan dan mengaktualisasikan nilai-nilai keistimewaan melalui potensi yang dimiliki oleh setiap desa.

Seperti halnya di Kalurahan Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah supra desa sangat mendukung sampai memberikan dukungan finansial, fasilitas, pembinaan, dan pendampingan juga supervisi untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan sesuai cipta karsa orang desa dan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat Girikerto.

Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Kalurahan Girikerto bersama Pemerintah Provinsi DIY semakin intens dalam pembangunan desa, sejak dikeluarkannya Keputusan Gubernur DIY No. 365/KEP/2020 tentang penetapan desa/kelurahan mandiri budaya, Girikerto kemudian semakin membenahi diri dan hanya dalam jangka waktu dua tahun Kalurahan Girikerto kembali menuliskan tinta emas sebagai Desa Mandiri Budaya (DMB) terbaik di tahun 2022. Dibawah bimbingan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) DIY, Kalurahan Girikerto mampu menyediakan berbagai macam

fasilitas yang bisa digunakan oleh masyarakat, diantaranya Stasiun Pengisian Tangki Air (SPTA), terbukanya lapangan pekerjaan dari pengolahan susu kambing peranakan etawa (PE) yang dikelola oleh BUMDes, dan partisipasi masyarakat juga begitu aktif ketika pendekatan budaya digunakan dalam menjangkau aspirasi masyarakat yang didukung dengan transparansi pemerintah desa sehingga membawa keberhasilan Girikerto menjadi DMB terbaik dari 18 DMB yang ada di DIY ([krjogja.com/2023](http://krjogja.com/2023)).

Peran yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Girikerto sudah sejalan dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) bahwa “pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dua kata kunci dalam pasal ini menjadikan asas yang menjadi landasan berjalanya pemerintahan di Girikerto ketika seluruh proses pembangunan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, sehingga pada hakikatnya segala rumusan pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan selalu memprioritaskan pembangunan yang berkelanjutan sehingga harapan terbaik dari masyarakat kalurahan bisa terwujud melalui pemerintah Kalurahan Girikerto selaku penyelenggara pemerintahan desa.

Kapasitas pemerintahan (*Governability*) yang dimiliki oleh pemerintah Girikerto cukup baik karena mampu mewujudkan kemandirian desa yang berbasis masyarakat (*Self Governing community*). mengapa predikat yang begitu gemilang mampu diraih dengan usaha yang terbilang cukup singkat?

melalui pendekatan perspektif Governability peneliti akan merumuskan bagaimana tahapan-tahapan reformasi bisa terjadi dan faktor apa saja yang menunjang sehingga membawa desa girikerto sebagai Desa Mandiri Budaya terbaik di Tahun 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka bisa ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana reformasi kalurahan dilakukan untuk mencapai Kemandirian Desa?
2. Faktor apa saja yang dihadapi oleh Kalurahan Girikerto untuk mencapai Kemandirian desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui reformasi kalurahan Girikerto dalam mewujudkan kemandirian desa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dihadapi oleh Kalurahan Girikerto dalam mewujudkan Kemandirian desa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun secara praktis:

1. Manfaat akademis akan dikontribusikan melalui penelitian ini untuk bisa memberikan bahan evaluasi atau catatan kritis dalam membangun kemandirian desa.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh di Kampus maupun di lingkungan sekitar sehingga bisa selalu berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan desa atau Kalurahan juga bisa menjadi bahan literatur bagi masyarakat umum terkhusus para pegiat desa.

#### **E. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan ruang lingkup pembahasan yang membatasi kefokuskan penelitian agar berjalan sesuai dengan apa yang menjadi fokus pelaksanaan penelitian sehingga data dan informasi yang diambil sesuai. Oleh karena itu yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah “Reformasi Kalurahan Untuk Kemandirian Desa Di Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta” yang meliputi:

1. Rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi legitimasi kalurahan dalam menjawab setiap persoalan yang ada di Kalurahan Girikerto.
2. Emansipasi sebagai jantung kemandirian desa yang menjadikan desa sebagai subyek pemberi manfaat
3. Redistribusi dana istimewa dari Pemerintah Provinsi DIY yang menjadi kekuatan baru dalam mewujudkan kemandirian desa.

#### **F. Literatur Review**

Pada literature review, penulis akan menggambarkan beberapa penelitian yang berkaitan tentang perubahan desa.

1. Penelitian bagian pertama ini dilakukan oleh Supardal, Widodo Triputro dan Anggarani Pribudi dalam jurnal yang berjudul Cultural-Independent Village: Towards Village Autonomy in A Cultural and Tourism Village in Yogyakarta. Jurnal Internasional Penemuan Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol. 9, No. 08, 2022. Penelitian ini menjelaskan tentang kemandirian desa mandiri budaya yang dicapai melalui 4 pilar kemandirian desa yaitu desa budaya, desa wisata, desa preneur, desa prima dan melihat relasi kuasa desa dan supra desa yang menjadi partner dalam membangun kemandirian desa. Dalam membangun kemandirian desa ditemukan bahwa desa yang mandiri secara budaya belum sepenuhnya mandiri. Karena interferensi yang terlalu mendominasi desa sehingga otonomi desa di rampas oleh pihak supra desa dan desa selalu bergantung pada dana istimewa, dilain sisi juga desa harus mengikuti ketentuan OPD 4 bidang.



2. Penelitian ini dilakukan oleh Fandi Ahmad, Iwan Kurniawan, dan F. Laksmi Fitriani dalam jurnal yang berjudul Pembangunan Desa Mandiri. Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora, Vol. 564, No. 2, 2020. Penelitian ini mencoba mengelompokan berbagai macam potensi di setiap desa yang ada di Kabupaten Bandung. Pengkategorian yang dilakukan dalam bentuk klaster, pembuatan program yang lebih fokus dan terarah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah upaya untuk bisa mewujudkan kemandirian desa berbasis potensi yang dimiliki oleh setiap desa.
3. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Oke Hendra, Maulana M. Janah, dan Deasy Indriani dengan judul Desa Panggunharjo Yogyakarta: Sebuah Praktek Terbaik Dari Reformasi Tata Kelola Desa. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol. 14, No. 1, 2022. Penelitian menunjukkan bahwa tata kelola desa bisa mewujudkan reformasi, langkah utama yang dilakukan panggunharjo melalui membangun basis data yang terbaru juga lengkap dan dilakukan dengan gaya kepemimpinan yang transformatif oleh kepala desa selama menjalankan roda pemerintahan.
4. Penelitian ini dilakukan oleh Budi Harjo salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, dalam jurnal yang berjudul Model Membangun Desa Mandiri. Jurnal Sosial Dan Humanis Sains, Vol. 2, No. 1, 2017. Penelitian ini memberikan wacana kritis tentang bangunan pemikiran dalam membangun desa. Dimana desa

dibangun selalu menggunakan asumsi bahwa “uang” adalah faktor utama pembangunan, dan hasil penelitiannya memberikan bukti bahwa asumsi itu tidak berhasil mengangkat desa menjadi lebih sejahtera dan mandiri. Sehingga perlu adanya upaya secara simultan dan dilakukan secara gotong royong juga berbagi peran tentunya dalam membangun desa.

5. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Retnayu Prasetyanti dan Bayu Mitra A. Kusuma yang berjudul *Quintuple Helix And Innovative Village Model (A Case Study Of Village Innovation In Panggungharjo Village, Yogyakarta)*. *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 16, No. 3, 2020. Penelitian ini membahas tentang inovasi yang menjadi penentu arah kemajuan desa panggungharjo, dimana kemajuannya tidak dari hasil duplikasi inovasi yang di praktekan di desa-desa pada umumnya. Panggungharjo mampu mengembangkan inovasi secara mandiri melalui pembentukan BUM Desa, partisipasi dan sinergi antar subsistem dalam model inovasi *quintuple helix* yaitu dari segi pemerintah, industri, masyarakat sipil, universitas, dan lingkungan alami. Ini menjadi daya dobrak yang besar atas kemajuan panggungharjo. Di sisi lain sematan keberhasilannya juga lahir dari sosok kepala desa yang menggunakan kapasitas politik dan kepemimpinan, kapasitas proses dan birokrasi, serta kapasitas sosial dan lingkungan sebagai penopang keberlangsungan pembangunan secara *roadmap* di panggungharjo.

6. Peneliti berikutnya dilakukan oleh Varlin Takdir Setiawan Waruwu, yang berjudul Narasi Perubahan Panggungharjo Di Bawah Kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi. Penelitian ini memberikan wacana perubahan yang terjadi di Panggungharjo dimana kehadiran Wahyudi Anggoro selaku kepala desa adalah sosok kajian yang dibahas, dalam melihat perubahan dan kemandirian Panggungharjo ditengah-tengah pesimisme bertebaran dalam alam pikiran banyak orang.
7. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Miftahul Noor Syahbana yang berjudul Inovasi Reformasi Birokrasi Di Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini membahas tentang inovasi-inovasi yang terjadi di panggungharjo dan dilain sisi membahas tentang relasi kuasa antara pemerintah desa dengan masyarakat. Penelitian ini menemukan praktek reformasi birokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Perubahan ini dilakukan melalui regulasi yang dibentuk dan diterapkan di aras lokal dengan pembagian tugas yang mendukung dari antar lembaga yang sudah ada maupun yang baru dibentuk di masa awal-awal kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi.
8. Penelitian ini dilakukan oleh Danang Septiyanto dengan judul Reformasi Birokrasi Di Kalurahan Panggungharjo. Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, Vol. 2, No. 2, 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perubahan itu ada karena kepercayaan masyarakat pada pemerintah hilang. Masyarakat banyak menganggap

penyelenggaraan pemerintah desa tidak lagi atas kepentingan dan kebutuhan masyarakat tetapi penuh kepentingan para elit. Olehnya itu pola relasi masyarakat dan pelayanan satu pintu serta perbaikan dari dalam tubuh pemerintah dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali. Dan perubahan itu bisa dilakukan di bawah kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi.

9. Penelitian ini dilakukan oleh Rohmat Junarto bersama M. Nazir Salim dengan judul Strategi Membangun Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Bukti Dari Gunung Sewu *Geopark*, Indonesia. Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5, No. 2, 2022. Penelitian Menunjukkan bahwa kemandirian desa mampu terwujud di Bejiharjo. Dengan basis pertanian dan pemanfaatan alam sebagai wisata ternyata mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dari segi pangan, sandang dan papan. Pertumbuhan ekonomi kreatif ternyata menjadi ladang pendapatan masyarakat yang sangat membantu mewujudkan kemandirian desa bejiharjo.
10. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Anita Marianta bersama Yorry Hardayani dengan judul Introspeksi Reformasi Desa. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, Vol.8, No. 2, 2019. Penelitian ini membahas perubahan yang terjadi di Desa Durian Demang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adakeseimbangan pembangunan yang dilakukan dari segi pembangunan fisik maupun dari segi non fisik. Pembangunan desa sangat tercermin

ketika lahirnya BUMDes sebagai representasi pemerintah desa dalam meningkatkan pengolahan kopi milik pertanian masyarakat, pembangunan infrastruktur jalan, rumah sakit yang diperoleh dari hasil negosiasi kepada pemerintah daerah meningkatkan kemandirian di desa durian demang.

Penelitian sebelumnya cenderung pada penelitian gaya kepemimpinan kepala desa yang mampu membawa inovasi berdasarkan prakarsa kompetensi kepala desa, dan di sisi lain dari penelitian lainnya juga menjelaskan tipe kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan para elit lokal karena adanya anggapan bahwa hanya dengan modal uang yang akan bisa membawa perubahan di desa. Penelitian sebelumnya juga lebih membahas kemandirian desa melalui birokrasi dan mewujudkannya melalui 4 pilar kemandirian desa yaitu desa budaya, desa wisata, desa preneur, desa prima dan BUM Desa sebagai basis produksi dan distribusi dalam membangun kemandirian desa.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri lebih cenderung pada Reformasi Kapasitas Kalurahan dari dimensi kultur dan struktur, tata kelola kalurahan dan sumber daya aparat kalurahan dalam kemandirian desa juga pada konteks Reformasi Otoritas Kalurahan dari dimensi rekognisi dan subsidiaritas dalam kemandirian desa. Penelitian ini tidak mendudukan reformasi hanya pada taraf birokrasi, tapi pada konsep desa yang bersatu, berdaulat adil dan makmur. Bersatu artinya adalah

bertenaga secara sosial termasuk mengatasi problem-problem pluralisme, kerukunan dan lain sebagainya. Juga berdaulat tanpa didominasi oleh pihak lain tapi mampu duduk pada taraf pemberi manfaat dan bukan pada penerima manfaat yang dijadikan lokus atau lokasi bahkan menjadi objek dari pembangunan. Dengan fakta empirik yang terjadi di Girikerto, peneliti berusaha menggali perealisasi reformasi kalurahan untuk kemandirian desa dalam membangun nasib yang lebih baik untuk rakyat.

## **G. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini disusun dalam rangka menjabarkan secara teoritis terkait dengan pertanyaan penelitian, dan menjadi acuan dalam melakukan studi di lapangan. Melalui tinjauan pustaka dari studi-studi perubahan, penulis mencoba menggunakan Governabilitas sebagai pintu masuk dalam melihat pembaharuan desa girikerto, juga dengan pola relasi yang dibangun oleh desa dengan supra desa maupun desa dan masyarakat.

### **1. Kemandirian Desa**

Kemandirian desa atau desa mandiri adalah konsep yang sudah dikenal sejak 1993, kemudian menjadi ikon gerakan lokal di berbagai tempat. Kemandirian desa harus dipahami secara substansi perbedaannya dengan kesendirian dan kedirian. Karena kemandirian bukan kesendirian dan bukanlah kedirian. Kedirian adalah bawaan yang berkesan sangat privat, ketika desa di intervensi oleh pemerintah atau orang lain yang mengakui dan menghormati desa, anggapan yang hadir

dalam benaknya hanyalah keasingan dari pihak lain yang hanya mengganggu eksistensinya. Desa beranggapan bahwa orang yang masuk kedalam internalnya selalu di anggap sebagai “orang lain” dan bukan “orang asli” olehnya itu desa mengklaim segala hal yang ada dalam wilayahnya adalah milik desa secara penuh. Sedangkan kesendirian berarti desa mengurus dan membangun dengan segala kemampuannya dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki oleh desa tanpa support ataupun dukungan dari Negara. Artinya Negara tidak hadir untuk mendukung desa (Negara mengisolasi desa).

Kemandirian desa tidaklah berjalan sendiri oleh karena itu, diperlukan pola relasi desa dan negara serta pendekatan pemerintah terhadap desa. Kehadiran negara rentan terhadap kekeliruan dengan intervensi yang membuat desa menjadi dilema. Negara tidak hadir salah, namun jika hadir keliru. Konsep kesendirian desa memberi bukti bahwa Negara tidak hadir, dalam konteks ini Negara melakukan isolasi terhadap desa.

Hal ini memiliki dampak yang besar terhadap desa yang saat ini masih banyak yang terkategori sebagai desa tertinggal. Disisi lain, hadirnya Negara terkesan berlebihan pada ranah desa yaitu dengan pemaksaan (*imposition*). Padahal hal ini hanya melumpuhkan prakarsa lokal dan kemandirian desa (Eko Sutoro, 2015).

Arturo Israel seperti yang dikutip dalam buku regulasi baru desa baru, menjelaskan bahwa, intervensi yang terlalu kuat pada hakekatnya berkorelasi negatif terhadap kinerja sebuah lembaga atau komunitas. Ini menunjukkan bahwa semakin kuatnya intervensi maka hanya membuat semakin lemah kinerja sebuah lembaga atau kelompok tersebut. Begitu juga dengan intervensi pemerintah yang terlalu kuat pada desa hanya membawa desa jauh dari kemajuan dan kemandirian desa.

Kemandirian dimaknai sebagai emansipasi desa. Emansipasi adalah persamaan hak dan pembebasan dari dominasi, sehingga desa tidak dijadikan sebagai obyek yang hanya menerima manfaat proyek, melainkan sebagai subjek yang berdiri tegak dalam memberikan manfaat (Eko Sutoro, 2015:94-98)

Dalam tahapan pencapaian desa menjadi mandiri, maka harus memiliki beberapa tahapan pencapaian yang harus dimiliki oleh desa, diantaranya adalah sudah menjadi desa budaya, desa wisata, desa prima dan desa preneur. Ini yang menjadi instrumen pendukung dalam melihat penyelenggaraan pemerintah yang mandiri dalam bingkai Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepanjang perjalanan, peran pendamping desa cukup besar dalam hal ini yang diutus dari Pemerintah Provinsi agar mendampingi pemerintah kalurahan ketika melakukan proteksi, distribusi, produksi dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk pembangunan yang berjalan secara berkelanjutan. Kedaulatan dan



kekuatan desa dapat menopang kesejahteraan warga sampai mampu melepaskan ketergantungan dan dominasi dari pihak lain.

## **2. Reformasi Pemerintahan**

Reformasi secara umum yaitu suatu proses perbaikan yang berspirit perubahan dari suatu keadaan ke bentuk keadaan yang lain. Secara mendasar kekuatan perubahannya terjadi dalam lingkup politik dan birokrasi, sedangkan jangka waktu yang dibutuhkan cenderung terbilang cepat atau pendek, ini dilatarbelakangi oleh pergulatan politik yang menginginkan terjadinya perubahan struktur politik dan institusi pemerintahan.

Inovasi adalah dialektika perubahan yang lahir dari gagasan pengetahuan, namun didukung dan di topang oleh teknologi. Strategi dalam melakukan inovasi tidak bisa dinafikan keberadaannya karena dengan adanya strategi yang digunakan, maka sangat membantu membenahi kinerja organisasi pemerintahan dalam memberikan layanan. (Eko, 2013). Dengan demikian inovasi merupakan pendekatan yang cukup teknokratik dalam praktek – praktek pemerintahan.

Jadi inovasi digerakan dengan basis ilmu pengetahuan, teknologi dan strategi, sedangkan reformasi didominasi oleh pergerakan struktur politik, kekuasaan dan birokrasi. Reformasi memang bergerak bukan hanya pada pergulatan politik semata, melainkan dibarengi dengan sikap

yang jelas dari pemerintah dalam mendesain terselenggaranya pemerintah yang ideal.

Seperti halnya yang terjadi pada bangsa ini, sudah beberapa kali melakukan perubahan-perubahan yang sistemik secara nasional bahkan sampai pada satuan-satuan pemerintahan terendah (desa). Sejak agustus 1946, delapan bulan pasca kemerdekaan Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, mengeluarkan serangkaian dekrit untuk melakukan perubahan - perubahan struktur dan sistem pemerintahan sampai tahun 1948. Perubahan ini terjadi secara besar-besaran dari tingkat kabupaten sampai tingkat pemerintah desa. Perubahan ini bahkan mengubah secara radikal rezim otokrasi Jawa yang didominasi oleh gagasan yang tumbuh di desa (Soemardjan, 2009:99). Atau pada tahun 1998 dimana perubahan terjadi begitu drastis ketika rezim orde baru berhasil ditumbangkan. Orde baru menerapkan sistem pemerintahan sentralistik, yang kemudian direformasi dengan menerapkan sistem desentralisasi.

Dalam menjalankan reformasi tidak serta merta terjadi perubahan yang signifikan. Karena menjalankan semangat reformasi tanpa adanya strategi-strategi yang tepat, ini hanya membawa perubahan yang bersifat sesaat dan tidak berkelanjutan. Menurut (Miftah Toha, 2014:109-111) dalam bukunya Birokrasi Pemerintah Di Era Reformasi menjelaskan bahwa strategi pembaharuan pemerintahan haruslah komprehensif dan

menyeluruh, tidak sporadis dan parsialistik. Menurutnya ada tiga poin penting yang perlu diperhatikan.

*Pertama:* kelembagaan birokrasi pemerintah yang ditinjau dari kultur dan struktur. Kultur adalah keterpaduan tata nilai, kebiasaan atau kebudayaan, dan kepercayaan yang diyakini kebenarannya untuk diperjuangkan dan dilestarikan sehingga menjadi daya tolong. Sedangkan struktur dimaksudkan sebagai kerangka yang digunakan sebagai tata aliran yang menjadi pondasi dalam menjalankan pemerintahan. *Kedua:* sistem penataan birokrasi pemerintahan atau tata kelola pemerintahan. *Ketiga:* Sumberdaya aparatur harus selalu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan pendampingan. Di lain sisi peningkatan kesejahteraan aparatur haruslah terjamin sehingga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemerintahan bisa maksimal.

Perjalanan reformasi di bangsa ini perlu adanya perbaikan-perbaikan sehingga cita-cita reformasi bisa tercapai. Terlebih khusus di tingkat desa atau kalurahan perjalanan roda pemerintahan yang berbasis pada *governability* masih sangat memprihatinkan. Berbagai macam masalah yang muncul sehingga melemahkan *governability* di desa, mulai dari pola relasi yang kurang baik dibangun, kerja-kerja pemerintah desa kaku dengan berbagai macam tuntutan yang

sebenarnya tidak berdampak begitu signifikan dengan hajat hidup orang desa.

Berikut beberapa poin konsep reformasi kalurahan menurut Eko Sutoro, (2023) yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

**a. Rekognisi dan subsidiaritas**

Rekognisi merupakan pengakuan terhadap hak asal usul. Sedangkan subsidiaritas merupakan penetapan kewenangan berskala desa dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat setempat (Sartika, 2016). Kedudukan desa yang berasas pada rekognisi dan subsidiaritas menghasilkan definisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa lokal, hak asal usul, dan atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disahkannya UU No. 6/2014 menempatkan desa dalam konsep masyarakat berpemerintahan (*self Governing Community*) dan pemerintah lokal (*local self government*), menjadikan desa mendapatkan kewenangan (*authority*) kembali dan membentuk kesatuan entitas hukum untuk desa (Rais, 2017) dan sebagai batu

landasan dan batu penjuruk bagi Negara. Batu landasan sama dengan integrasi. Artinya desa diintegrasikan atau diserap ke dalam Negara, dan batu penjuruk artinya desa menjadi kekuatan untuk penetrasi Negara ke masyarakat setempat. Bagaimanapun, ini adalah konsep dualistik dan tidak tunggal antara warga negara dengan masyarakat setempat. Jadi ada kepentingan masyarakat setempat dan ada kepentingan warga negara. Pemerintah itu mempunyai otoritas dalam mengatur, mengurus, melayani, melindungi warga Negara.

Desa pada hakekatnya mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Masyarakat setempat inilah yang menjadi poin penting di dalam asas subsidiaritas. Karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat, maka ini diatur dan diurus sepenuhnya oleh desa tanpa harus dicampur tangani oleh pemerintah di atasnya. Pemerintah di atasnya lebih baik cuci tangan daripada campur tangan tetapi yang terbaik adalah turun tangan (subsidiaritas).

Lawan dari kata subsidiaritas adalah residualitas yang berakar pada kata residu (sisa-sisa). Tindakan pemerintah yang mengambil segala hal yang bisa diurus oleh desa, karena residu adalah konsep yang mengikuti desentralisasi sehingga menjadikan desa hanya akan menjalankan penugasan dan pertolongan yang

disodorkan oleh pemerintah daerah yaitu sisanya sisa dari apa yang bisa dibuat oleh pemerintah daerah. Sehingga perlunya kita mendudukan desa dengan asas rekognisi dan subsidiaritas yang menjadikan desa mampu menghasilkan kewenangan lokal berskala desa untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat (Eko Sutoro, 2023)

**b. Emansipasi Desa.**

Emansipasi desa merupakan jantung kemandirian desa. Dengan emansipasi yaitu memiliki persamaan hak dari dominasi, desa akan membawa kemajuan desa sampai pada kemandirianya. Dalam konteks ini, antara pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, organisasi masyarakat, dan warga membangun aksi kolektif untuk mengarahkan segala aset-aset lokal yang bisa menghasilkan nilai tawar yang besar sehingga mampu melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan desa. Emansipasi selalu menghargai lokalitas (institusi, pengetahuan, dan kearifan lokal) sebagai kebajikan dan mengikat kohesi sosial bagi masyarakat sehingga desa tidak dijadikan sebagai objek yang hanya menerima manfaat, melainkan sebagai subyek yang berdiri tegak dalam memberi manfaat (Eko Sutoro, 2011:13)

### **c. Redistribusi Dana Istimewa (DAIS)**

Redistribusi dana istimewa merupakan langkah pengalokasian dana dari provinsi yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya yang kemudian dikenal dengan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Redistribusi dana keistimewaan ini kepada kalurahan adalah langkah yang sangat membantu dalam mewujudkan kemandirian desa. Dalam Pergub DIY No.37/2022 tentang pedoman pelaksanaan dana istimewa kepada pemerintah kalurahan, menjelaskan bahwa dana istimewa bertujuan untuk pemberdayaan, dan peningkatan potensi masyarakat, juga percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur. Pengalokasian dana istimewa dilakukan dalam dua alur yakni jalur kedinasan dan jalur desa yang kemudian dikenal dengan Top Down dan Bottom Up.

1. Top Down merupakan pengalokasian dana istimewa melalui jalur Kabupaten dengan mengajukan penganggaran program dan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dana keistimewaan menggunakan pagu alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah.
2. Bottom UP merupakan dana yang muncul dari inisiatif pemerintah kalurahan yang menyusun rencana program

kegiatan dan kebutuhan pendanaan keistimewaan yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah kalurahan dengan badan permusyawaratan kalurahan
- b) Usulan bisa langsung dari pihak pemerintah kalurahan kepada Gubernur DIY yang kemudian harus diverifikasi oleh Panewu dan Dinas PMKal Kabupaten, agar anggaran yang dialokasikan tidak terjadi dobel dengan APBD Pemerintah Kabupaten.

#### **d. Demokratisasi**

Demokratisasi desa adalah hal yang sangat dekat dengan keberadaan institusi pemerintah desa dan kehidupan masyarakat setempat. Hal yang paling mendasar dalam mewujudkan demokratisasi desa adalah adanya kebebasan yang terdiri dari dua hal yakni: pertama adalah kebebasan masyarakat dalam menentukan sendiri berbagai macam kepentingan yang ada di desa sehingga mampu mandiri menentukan arah kehidupan di desa. Kedua adalah dengan membuka kesempatan ke berbagai komunitas yang memiliki tuntunan yang beragam untuk bisa berkontribusi dalam mengusungkan ide-ide agar dapat membuat peraturan dan programnya sendiri juga bisa berkolaborasi dengan institusi-institusi desa lainnya. Sehingga mampu mewujudkan kebebasan (*liberty*) dan



pemerintah dapat melayani segala urusan atau tuntutan masyarakat yang berbeda-beda. (Mahfud, 2000.183)

#### **e. Teknologi Tepat Guna**

Teknologi tepat guna merupakan langkah yang mampu mendukung produksi dan distribusi. Terutama distribusi. Sehingga BUMDes mampu mengelola teknologi tepat guna untuk digunakan dalam bergelut, berkolaborasi, dan bergotong royong dengan masyarakat petani, peternak, nelayan dan lain-lain sehingga bisa muncul nilai tambah secara ekonomi. Jadi berkembang dari bawah akan mampu mengantarkan sampai pada kemandirian desa (Eko Sutoro, 2023)

Dari kerangka konseptual di atas, maka peneliti hanya akan meng fokus di 3 (tiga) konsep dari lima konsep reformasi di atas yaitu dari rekognisi dan subsidiaritas, emansipasi desa, dan redistribusi dana istimewa kepada kalurahan. Karena demokratisasi desa hanya akan mampu berjalan secara tidak langsung dengan sendirinya jika ketiga unsur aspek yang dipilih di atas dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terjebak dengan program-program digitalisasi yang hanya akan menghambat terwujudnya demokratisasi desa. Olehnya itu digitalisasi harus dipahami dalam konteks teknologi tepat guna sehingga tidak terjebak menjadi pejabat digital yang hanya memamerkan pekerjaan di kantor kalurahan. Itulah mengapa peneliti membatasi di tiga konsep dipilih

di atas karena kedua konsep antara demokratisasi dan teknologi tepat guna adalah pendukung dan penopang terbentuknya legitimasi desa yang akan diwujudkan melalui rekognisi dan subsidiaritas, emansipasi desa, dan redistribusi dana istimewa, sehingga bisa membawa kemandirian desa.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sebagai bahan acuan metode yang digunakan dalam menelusuri data-data di lapangan yang digambarkan dalam bentuk uraian. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bikel dalam Syahbana (2022) bahwa penelitian kualitatif merupakan serangkaian prosedur yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ucapan, tulisan, ataupun perilaku orang-orang yang diamati.

Dinamika sosial dalam masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan, adalah basis utama yang dijadikan landasan dalam argumentasi data. Karena dalam dinamika tersebut terkandung sikap moral, etika, rasionalitas dan pola pikir ataupun nilai-nilai budaya yang selalu dipegang teguh dalam perjalannya.

## 2. Unit Analisis

### a. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Reformasi Kalurahan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Girikerto untuk kemandirian desa/kalurahan.

### b. Subjek penelitian

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang di dalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan desa girikerto yang bisa memberikan informasi dan data-data terkait dengan reformasi kalurahan dan memiliki peran serta kontribusi yang besar terhadap terselenggaranya reformasi desa di kalurahan Girikerto. Penentuan informan dilihat dengan beberapa kriteria peneliti yang dianggap relevan dalam mendukung penelitian ini diantaranya:

**Tabel 1.1**  
**Subjek Penelitian**

No	Pihak-Pihak Yang Terkait	Nama
1	Lurah (Kepala Desa)	H. Sudibya S.Pd
2	Carik (sekretaris kalurahan)	Krisna Cahyana S.H
3	Jagabaya (kasi pemerintahan)	Edy Sunarno S.T
4	Ulu-ulu (kasi kesejahteraan)	Agus Tri Wibowo S.Kom
5	Kamituwa (kasi sosial)	Teguh Raharjo S.Pt
6	Tata Laksana (kaur TU dan Umum)	Hariana
7	Pangripta (kaur perencanaan)	Samirin
8	Danarta (kaur keuangan)	Dwi Rahmad S.TP
9	BPKal (badan usaha milik kalurahan)	Suwarna
10	Staf Pangripta	Roby Hasan N.C, S.Pd
12	Ketua BUMKal	Rudi Pramoko S.Pd
13	Warga Girikerto penggerak UMKM Giri Sembada	Ibu Ismiati
14	Warga Girikerto	Mas Huda

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan beberapa teknik ini membantu penulis dalam mendapatkan informasi dan data-data yang bisa dijadikan sebagai basis analisis penelitian.

- a. Wawancara (*interview*) merupakan langkah yang digunakan dalam menggali berbagai macam informasi. Peneliti melakukan upaya penggalian informasi dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan. Sehingga ide dan gagasan yang

disampaikan dalam wawancara menjadi data primer yang bisa menggambarkan bagaimana hal-hal yang mendasar yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak pemerintah itu sendiri selaku penyelenggara pemerintah kalurahan. Selain itu, peneliti mengumpulkan hasil-hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak lain yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti dan ada beberapa fokus penelitian yang akan ditanyakan antara lain:

- 1) Bagaimana otoritas pemerintah desa bisa menjalankan reformasi kalurahan dengan asas subsidiaritas yang dimilikinya?
- 2) Bagaimana kapasitas yang dimiliki desa mampu membawa kemandirian desa melalui asas rekognisi yang dimilikinya?
- 3) Bagaimana pola relasi yang dibangun oleh pemerintah kalurahan dengan pihak supra desa?
- 4) Apakah supra desa masih mendominasi jalannya pemerintahan kalurahan Girikerto?
- 5) Lalu bagaimana hubungan pemerintah kalurahan dengan masyarakat setempat dalam hal produksi dan distribusi?
- 6) apakah partisipasi masyarakat aktif dalam setiap program pemerintah kalurahan?
- 7) Apakah kalurahan Girikerto mendapatkan redistribusi dana keistimewaan?

- 8) Program dan kegiatan apa saja yang diusulkan untuk mendapatkan redistribusi dana istimewa?
- b. Teknik pengumpulan data yang berikutnya adalah dengan cara Observasi partisipan. Artinya peneliti terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan dengan berbaur ke dalam pemerintahan kalurahan dengan proses magang. Sehingga peneliti dapat mengamati bagaimana keseharian para aktor penggerak perubahan terutama masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan visi dan misi yang menjadi nilai keyakinan dan capaian yang harus direalisasikan secara bersama-sama di girikerto.
  - c. Dokumentasi adalah data yang sangat mendukung dalam pengumpulan data. Karena banyak data-data yang di pajang atau di publish oleh pihak pemerintah sebagai bentuk transparansi pemerintahan yang mengandung kegiatan-kegiatan perubahan yang menopang semangat pergerakan kemandirian desa dengan kekuatan lokal. Melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah kalurahan bersama Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal), baliho-baliho yang dipajang, media online seperti youtube, instagram, facebook, dan media-media lokal lainnya, maupun dokumen seperti buku, catatan, jurnal, majalah, Koran dan lain sebagainya, akan peneliti gunakan dalam penggalian informasi.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah serangkaian upaya yang mencoba mensistematisasikan transkrip catatan lapangan, wawancara, observasi, dan lain sebagainya yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan penyederhanaan data sehingga dapat dengan mudah dipahami.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data model Creswell. Prosedur dalam analisis kualitatif menurut Creswell memiliki beberapa tahapan: pertama sebelum peneliti melakukan kegiatan analisis data, peneliti perlu menyajikan data mentah yang berupa transkrip, catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan pandangan dari peneliti sendiri. Data mentah kemudian dibuat dalam bentuk transkrip atau narasi singkat. Menyiapkan data-data kemudian diorganisasikan untuk dianalisis, setelah itu peneliti melakukan deskripsi atas data dan mengkonstruksi data yang telah tersusun (Sugiono, 2019:344-348).

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN GIRIKERTO**

#### **A. Sejarah Kalurahan Girikerto**

Girikerto merupakan desa atau kalurahan yang berada di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Keberadaan Girikerto tidak terlepas dari bentuk Reformasi yang dilakukan oleh DIY di awal-awal kemerdekaan. Pasca kemerdekaan kalurahan Girikerto merupakan salah satu wilayah yang dilakukan penggabungan dengan empat kalurahan yakni dari Kalurahan Ngandong, Kalurahan Tanggung, Kalurahan Kemiri Kebo, dan Kalurahan Nangsri Lor.

Pada Tahun 1946, empat kalurahan kemudian digabungkan menjadi satu wilayah pemerintahan Otonom yang berdasar pada Maklumat Pemerintah DIY Tahun 1946 mengenai pemerintah kalurahan dengan nama Desa Girikerto. Girikerto kemudian ditetapkan secara resmi sebagai kalurahan baru yang ditandai dengan dikeluarkannya dekrit pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah kalurahan di Yogyakarta. Sehingga kalurahan Girikerto menjadi satu kalurahan baru yang memiliki 13 (tiga Belas) padukuhan. Berikut pembagiannya:



**Gambar 1.1**  
**Peta Wilayah Kalurahan Girikerto**



*Sumber: Profil Kalurahan Girikerto Tahun 2023*

Dalam perjalanannya, kalurahan Girikerto secara perlahan membenah diri untuk memajukan desa dengan tertata. Teknologi dan kapasitas pemerintahanya terus ditingkatkan juga didukung dengan kebijakan-kebijakan strategis berbasis potensi desa, dan regulasi yang cukup mengikat.

## **B. Kondisi Geografis Kalurahan Girikerto**

Desa/kalurahan Girikerto berada di dalam wilayah Kapanewon Turi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, kalurahan Girikerto berada di lereng Gunung Merapi dengan ketinggian antara 400-975 MDPL, sebagian besar wilayah ini digunakan untuk pertanian dengan kondisi kemiringan antara 15° s/d 28°C. Girikerto merupakan daerah perbukitan atau pegunungan dengan tanah yang secara umum berpasir dan berbatu cadas.

Batas wilayah desa/kalurahan Girikerto yaitu;

- a) Sebelah utara : Desa Kaliurang
- b) Sebelah Timur : Desa Purwobinangun
- c) Sebelah Barat : Desa Wonokerto
- d) Sebelah Selatan : Desa Donokerto

Kalurahan Girikerto memiliki luas wilayah 1.309,60 Ha. Perjalanan ke Girikerto terbilang cukup mudah dijangkau dengan kendaraan sepeda motor ataupun mobil, karena akses jalan sudah cukup bagus untuk dilalui. Jarak tempuh dari Ibu Kota Kecamatan 3 km, dari Ibu Kota Kabupaten 11 km, dan jarak dari Ibukota Provinsi hanya berjarak 22 km.

### **C. Kondisi Demografi**

Kalurahan Girikerto merupakan kawasan yang terletak di Lereng Gunung Merapi yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional 37 Gunung Merapi, dengan ini bisa dikatakan bahwa Kalurahan Girikerto merupakan Kalurahan yang paling utara dari Kabupaten Sleman dilihat dari wilayah tengah. Penduduknya mayoritas adalah petani dan peternak, karena kawasan ini sangat bagus untuk bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. Agar dapat melihat demografi kependudukan yang ada di Girikerto perlunya Analisis kependudukan masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas. Demografi merupakan studi ilmiah tentang penduduk

terutama berkaitan dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Demografi mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk dan karakter demografis serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, demografi fokus mengkaji permasalahan kependudukan, sehingga teknik-teknik perhitungan data kependudukan atau demografi sangat diperlukan. Dengan dasar ini peneliti akan menyajikan data kependudukan Kalurahan Girikerto dengan sajian yang dikelompokkan ke beberapa kriteria diantaranya:

## 1. Jumlah Penduduk:

### a. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kisaran usia penduduk Girikerto paling banyak antara 25- 49 tahun yakni sebesar 34,8%, selanjutnya kelompok lansia (diatas usia 50 tahun) sebesar 28,39%. Sedangkan usia remaja dan pemuda hampir sama yaitu 18,98% usia antara, 0-14 tahun, dan 17,81% Usia 15-24 tahun.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**

No	Usia Penduduk	Jumlah
1	Usia 0 – 14 (tahun)	1571 orang
2	Usia 14 – 25 (tahun)	1474 orang
3	Usia 25 – 50 (tahun)	2881 orang
4	Usia 50 – Seterusnya	2352 orang
Total keseluruhan		8278 orang

Sumber: RPJMKAL Girikerto Tahun 2021-2026

- b. Berdasarkan mata pencaharian, mayoritas penduduk di Girikerto adalah petani dengan jumlah mencapai 3.375 orang atau sekitar 38,84% dari total penduduk. Sementara itu, jumlah penduduk yang terlibat dalam industri rumah tangga sangat sedikit, hanya 55 orang atau sekitar 0,63%. Informasi lebih lanjut mengenai data penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat ditemukan pada Tabel berikut.

**Tabel. 2.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	3375
2	Buruh Tani	467
3	Pedagang	192
4	Pegawai Negeri	186
5	Pegawai Swasta	519
6	Industri RT	55
7	Lain-lain	72
Total Keseluruhan		5566

*Sumber: RPJMKAL Girikerto Tahun 2021-2026*

Tingkat aktivitas di Kalurahan Girikerto pada usia produktif cukup tinggi jika dibandingkan dengan pekerjaan formal seperti menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bekerja di perusahaan swasta. Masalah ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga menjadi permasalahan nasional yang lebih luas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya

pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan program dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai. Dengan cara ini diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih pintar, cerdas, dan mandiri, sehingga mereka dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Tak sedikit penduduk Kalurahan Girikerto yang berkeinginan untuk memajukan daerah mereka dengan menggarap lahan dan berwirausaha, tanpa tergantung pada pekerjaan kantor.

- c. Berdasarkan data terakhir, populasi penduduk Desa Girikerto dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan yang mereka capai. Sebanyak 20,51% dari penduduk di desa tersebut tidak memiliki pendidikan formal, dan mayoritas dari mereka adalah lansia atau orang yang berusia di atas 50 tahun. Hal ini bisa disebabkan oleh kesadaran akan pentingnya pendidikan pada masa sekolah mereka dulu, keterbatasan jumlah sekolah, jarak yang jauh dari tempat tinggal, atau karena keterbatasan ekonomi. Sementara itu, sebesar 6,79% dari anak balita di desa tersebut juga belum lulus. Namun, sebagian besar, yakni 68,44%, telah mengikuti pendidikan mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi. mayoritas dari mereka merupakan lulusan dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Berikut rincian tingkat pendidikan penduduk Desa Girikerto:

(diikuti dengan rincian tingkat pendidikan sesuai data yang dimiliki).

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No	Kelompok	Jumlah
1	PAUD dan Lulus TK	973
2	Tamat SD/Sederajat	1613
3	Tamat SMP/Sederajat	1261
4	Tamat SMA/Sederajat	1818
5	Akademi/PT	353
6	Tidak/Belum Sekolah	2260
TOTAL		8278

*Sumber: RPJMKAL Girikerto Tahun 2021-2026*

## **2. Keadaan Sosial Kalurahan Girikerto**

Mayoritas penduduk Kalurahan Girikerto berada pada usia produktif, yaitu antara 25 hingga 49 tahun, dan mereka merupakan sumber utama tenaga kerja. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk menampung mereka sehingga mereka dapat bekerja dan memperoleh penghasilan. Meskipun di Kalurahan Girikerto tidak terdapat banyak perusahaan yang dapat menampung banyak tenaga kerja, namun hampir tidak ada penduduk yang menganggur. Sebagai alternatif, sebagian besar penduduk Kalurahan Girikerto menjalankan kegiatan pertanian atau perkebunan sebagai mata pencaharian utama mereka sehari-hari.

Selain itu, beberapa masyarakat juga mengembangkan usaha produktif lainnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Masyarakat di Kalurahan Girikerto memiliki tingkat kehidupan yang beragam, beberapa di antaranya berada dalam kondisi pra sejahtera bahkan orang miskin. Meskipun begitu, mereka menjaga keharmonisan dan kerukunan melalui kegiatan gotong royong, pertemuan rutin di tingkat RT, Padukuhan, dan PKK, serta berbagai pertemuan ritual seperti tahlilan, aqiqah, dan kesripahan sebagai bentuk solidaritas persaudaraan. Peran perempuan dalam pembangunan juga sangat aktif di berbagai bidang, termasuk pertanian, produksi rumah tangga, dan buruh. Kelompok Perempuan seperti PKK Kalurahan, PKK Padukuhan, PKK RT, Dasa Wisma, Posyandu, dan berbagai kelompok lainnya memiliki peran yang signifikan dalam aktivitas dan pembangunan di Kalurahan Girikerto.

Masyarakat di Kalurahan Girikerto juga menyadari akan pentingnya pola hidup sehat dan telah berusaha meningkatkan kualitas kesehatan melalui kegiatan seperti posyandu, posbindu, sosialisasi, dan pelatihan kader kesehatan. Upaya ini berhasil meminimalisir angka kematian akibat masalah kesehatan di berbagai kelompok usia. Kondisi keamanan dan kenyamanan masyarakat di Girikerto cukup baik karena kesadaran akan pentingnya kondusifitas. Konflik antar kelompok atau individu jarang terjadi, dan apabila ada masalah,

masyarakat dan pemerintah selalu sigap untuk menanganinya melalui asas kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Rutinnya kegiatan ronda di pos kamling di setiap dusun turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan.

Upaya peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia di Kalurahan Girikerto berjalan dengan baik melalui komunikasi terbuka dan gotong royong warga. Meskipun ada pengaruh modernisasi, masyarakat tidak melupakan pelestarian budaya adat kebiasaan mereka, yang tercermin dalam perilaku, kesenian, keterampilan, dan berbagai aspek budaya lainnya.

Sebagai hasil dari upaya pelestarian kebudayaan yang konsisten, Kalurahan Girikerto mendapat pengakuan dan apresiasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kalurahan Budaya pada tahun 2015 dan kemudian dinobatkan sebagai Kalurahan Mandiri Budaya pada tahun 2020, yang merupakan kualifikasi tertinggi dalam hal kebudayaan.

### **3. Keadaan Ekonomi**

Mayoritas masyarakat di Kalurahan Girikerto mengandalkan pertanian dan peternakan sebagai sumber utama perekonomian. Hasil dari kegiatan pertanian dan perkebunan ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas, meskipun tingkat kemakmuran



mereka mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Meskipun ada beberapa warga yang memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI, POLRI, Guru, atau buruh, namun sebagian besar masih terkait dengan sektor pertanian dan perkebunan.

Dalam hal pertanian, masyarakat sudah menyadari pentingnya pengetahuan dalam mengembangkan usaha pertanian mereka. Mereka menggunakan beberapa metode dan sistem yang lebih modern serta menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian yang optimal. Beberapa metode yang digunakan antara lain adalah bertani dengan sistem jajar legowo, tumpangsari, dan lain sebagainya. Berbagai jenis tanaman yang ditanam meliputi hortikultura, salak pondoh, palawija, sayuran, dan jenis tanaman lain yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dibidang perkebunan, mayoritas warga masyarakat beternak kambing Peranakan Etawa (PE) ras Kaligesing. Hasil dari peternakan kambing ini adalah air susu kambing yang dijual oleh peternak dan diolah oleh pabrik susu kambing. Wilayah Girikerto telah memiliki lebih dari 13 pabrik pengolahan air susu kambing PE yang beroperasi. Lokasi peternakan ini memberikan dampak positif bagi warga yang menjadi peternak, karena dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan alternatif pekerjaan, terutama karena harga jual air susu kambing yang masih tinggi.

Selain kandang kambing, ada juga warga yang beternak sapi, unggas, dan ikan. Namun, penyebaran sektor hubungan ini tidak merata karena dipengaruhi oleh kondisi geografis dan lingkungan yang mendukung.

Masyarakat mencapai peningkatan taraf hidup dengan berbagai cara dan salah satunya adalah melalui berwirausaha dengan usaha kecil menengah. Mereka menghasilkan berbagai produk seperti makanan olahan, kerajinan, ketrampilan, kosmetik, dan warungan kelontong. Bukti keberhasilan dari upaya ini adalah adanya lebih dari 40 anggota Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kalurahan Girikerto yang mampu berinovasi dalam bidang perekonomian. Warga mendapatkan dukungan berupa pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas usaha dan hasil produksi mereka.

Potensi ekonomi perdagangan di Kalurahan Girikerto terlihat dari adanya warung kelontong yang tersebar di setiap padukuhan. Meskipun begitu, fasilitas perekonomian umum seperti pasar kalurahan “Nggowo” belum dimaksimalkan secara optimal. Selain itu, pasar ikan di Daleman dan pasar kambing di Nganggring juga belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat.

**Table 2.4**  
**Fasilitas Perekonomian**

No	Fasilitas Perekonomian	Jumlah
1	Pasar Modern/Swalayan/Supermarket	1
2	Pasar Tradisional	1
3	Ruko	9
4	Took (besi, apotik)	1
5	Warung/Kios	119
6	Warung PKL (angkringan dan lai-lain)	8

*Sumber: RPJMKAL Girikerto Tahun 2021-2026*

Disamping perdagangan, terdapat potensi ekonomi dalam bidang jasa seperti penjahit, salon, bengkel, meubelair, dan sejenisnya, yang ada di beberapa tempat di Kalurahan Girikerto. Industri rumah tangga juga mulai tumbuh dan berkembang di daerah ini.

Kalurahan Girikerto diidentifikasi sebagai kawasan strategis yang memiliki potensi pertumbuhan cepat, termasuk sebagai kawasan agropolitan. Hal ini mengindikasikan bahwa warga masyarakat memiliki peluang yang besar dan bergantung pada usaha pertanian, serta dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan pertumbuhan tanaman, serta kegiatan yang lebih baik.

**Table 2.5**  
**Potensi Ekonomi**

No	Potensi Ekonomi	Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah/ Kapasitas Produksi
1	Klp. Ternak Sapi	123	232	-
2	Klp. Ternak Kambing	268	284	2022
3	Klp. Perikanan	131	131	2,5 ton
4	Tahu-Tempe	34	34	-
5	Salon	8	11	-
6	Perbengkelan	17	-	31
7	Pengolahan Susu Kambing PE	11	26	-
8	Makanan Ringan	41	43	-
9	Penjahit	4	4	-

*Sumber: RPJMKAL Girikerto Tahun 2021-2026*

#### **D. Kelembagaan**

Keberadaan kelembagaan atau organisasi pemerintah sangatlah penting keberadaanya dalam menjalankan roda pemerintahan di kalurahan. Dengan otoritas dan legitimasi yang dimiliki, lembaga pemerintahan akan membawa pergerakanya dalam memenuhi segala kebutuhan dan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Di kalurahan Girikerto terdapat dua lembaga pemerintahan yang menjadi representasi aspirasi dan gagasan-gagasan yang tumbuh di kalurahan, yaitu lembaga pemerintah kalurahan dan lembaga kemasyarakatan desa.

## **1. Lembaga Pemerintah Kalurahan**

Pemerintah kalurahan merupakan lembaga yang dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat/pamong selaku unsur penyelenggara pemerintahan.

Kepala desa atau disebut dengan Nama lain sebagai Lurah merupakan penanggung jawab dari penyelenggaraan pemerintah kalurahan yang dipilih langsung oleh masyarakat girikerto melalui tahap pencalonan sampai tahap pemilihan. Dengan terpilihnya Lurah Girikerto sebagai pejabat politik yang berkedudukan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan mengurus kemasyarakatan. Maka dalam penyelenggaraan pemerintahan, Lurah Girikerto akan dibantu oleh para pamong kalurahan yakni Carik, Tata Laksana, Pangripta, Danarta, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwo dan bersama Kepala Kewilayahan (Dukuh). Tugas dan fungsi Lurah sudah diatur dalam Peraturan Kalurahan Girikerto No. 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Girikerto diantaranya yaitu Penyelenggara Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.

Dalam menjalankan pekerjaannya, Lurah akan dibantu oleh sejumlah staf dan karyawan. Tim kerja ini terdiri dari 1 (satu) Orang Carik, Danarta, Pangripta, Tata Laksana, Jagabaya, Ulu-ulu, dan

Kamituwa, serta 13 (tiga belas) Orang Dukuh, 5 (lima) Orang staf tetap, 1 (satu) karyawan dengan status tidak tetap, dan 1 (satu) kader pemberdayaan masyarakat. Berikut kelembagaan Pemerintah Kalurahan Girikerto.

**Gambar 1.2**  
**Struktur Pemerintahan Kalurahan Girikerto**



Sumber: RPJMKAL Girikerto Tahun 2021-2026

## 2. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal)

BP-Kal merupakan lembaga yang bertugas untuk mengkoordinasikan kepentingan masyarakat setempat, memberikan saran dan pertimbangan kepada lurah, serta mengawasi pelaksanaan pembangunan dan kegiatan yang ada di kalurahan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan akan menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

masyarakat kalurahan dengan berdasar pada keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Dalam Peraturan Bupati Sleman No 11.1 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati No 22.1 Tahun 2019 tentang biaya operasional dan besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa/Kalurahan mengatur secara rinci tugas dan fungsi BPKal.

**Gambar 1.3**  
**Badan Permusyawaratan Kalurahan Girikerto**



Sumber: RPJMKAL Girikerto Tahun 2021-2026

### 3. Lembaga Desa

#### a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)

LPMK merupakan lembaga yang berperan dalam pemberdayaan yang bermuara pada arah peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan memperkuat partisipasi serta peran aktif masyarakat untuk bersama-sama membangun kalurahan dengan spirit gotong royong. Kalurahan Girikerto memiliki lembaga LPMK, seperti dalam Tabel 2.6

**Tabel 2.6**  
**Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**

No	Jabatan	Nama
1	Ketua I	Ir. Siswantara
2	Ketua II	Wagiman
3	Sekretaris I	Kalis Triyanto S. Pus
4	Sekretaris II	Try Dady Widiysnto
5	Bendahara I	Waliyo S.Pd
6	Bendahara II	Sardi S.Pd MM
7	Bidang Pembangunan Fisik	Ir. Priyatmoko Harjanta
8	Bidang Keagamaan	Arkham Lukman
9	Bidang Pendidikan, Pelatihan	Agung Tri Suryanto
10	Bidang Ekonomi	Sunarto Suranto
11	Bidang Budaya	Suhariyanto Murwato
12	Bidang Pemuda dan Olahraga	Ari Widianoro

Sumber: RPJMKAL Girikerto Tahun 2021-2026



Peran LPMK sangat membantu pemerintah kalurahan dalam membangun kalurahan. Selain dari meningkatkan partisipasi masyarakat setempat, LPMK Girikerto juga terlibat dalam kegiatan pengembangan sosial seperti dalam pemberian pemahaman atas pentingnya pendidikan, menjaga lingkungan yang asri, bisa berdampak pada kesehatan dan pariwisata, hingga kegiatan yang mempromosikan kegiatan-kegiatan budaya yang bisa membawa nilai tambah ekonomi.

**b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

PKK merupakan organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan agar perempuan mampu berdaya guna dan menopang kemajuan kesejahteraan di setiap keluarga yang ada di kalurahan. Peran aktif yang sangat positif dari tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga menjadikan PKK sebagai komunitas yang diasosiasikan sebagai perkumpulan Ibu-ibu yang sangat diprioritaskan juga dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Kalurahan Girikerto.

Kegiatan positif yang sifatnya membangun selalu diusahakan mampu tumbuh dari kaum Ibu-ibu di Kalurahan Girikerto, mulai dari kegiatan pengajian, keluarga berencana (KB), kegiatan pelatihan UKM, seminar kecil-kecilan tentang

kesehatan reproduksi, dan kesehatan anak, sampai dengan pemberian pemahaman atas KDRT.

PKK dalam perjalanannya di Girikerto, hanya dianggotai oleh kalangan Ibu-ibu saja. Padahal secara substansi berbicara kesejahteraan keluarga sudah seharusnya pergerakan Ibu-ibu tidak membelenggu pemahamannya hanya sampai pada kalangan wanita atau perempuan semata, namun harus juga dilibatkan dengan kepala rumah tangga seperti dari kalangan Bapak-bapak. Ini memang tidak terlepas dari program beberapa fungsi utama PKK yang sangat mengikat yaitu: penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan serta tatalaksana rumah tangga, pendidikan serta keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, sampai perencanaan sehat. Berikut data 2.4 tentang keanggotaanya.

**Tabel 2.7**  
**Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga**

Jabatan	Nama & Anggota	Keterangan
Pelindung	H Sudibya S.Pd	Lurah Girikerto
Pembina	Teguh Raharjo S.Pt	Kamitua
Ketua	Hj. Winarti A.Md. Keb	Menyusun Rencana Kerja
Wakil Ketua	Isnaini Okvianing Azizah A.Md. Keb	
Ketua umum Pokja	Lilis Kusuma Dewi	Pembinaan Karakter Keluarga, pendidikan, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan keluarga, dan kesehatan keluarga.
Bendahara	Mardiati	
Ketua Pokja I	Eni Lestari dan 7 anggota lainnya	Penghayatan, pengamalan Pancasila dan gotong royong
Ketua Pokja 2	Anuk Miarsa dan 8 anggota lainnya	Pendidikan dan keterampilan, pengembangan kehidupan berkoperasi
Ketua Pokja 3	Rumiyanti dan 8 anggota lainnya	Pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga
Ketua Pokja 4	Nurhayati dan 8 anggota lainnya	Kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat

*Sumber: RPJMKAL Girikerto Tahun 2021-2026*

### c. Struktur Organisasi Karang Taruna

Seperti halnya yang digambarkan dalam Tabel 2.8 sangat berperan memajukan berbagai bidang pembangunan yang digerakan oleh para pemuda di Girikerto diantaranya adalah membangun Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Rekreasi Olahraga, dan Kesenian (ODK), Unit Kesehatan Sosial (UKS),

Humas Kemitraan Dan Media (KDM), Pendidikan Dan Pelatihan (PDP), Lingkungan Hidup dan Pariwisata (LHP) dan Kerohanian dan Bina Mental (KBM).

**Tabel 2.8**  
**Struktur Organisasi Karang Taruna**

Jabatan	Nama	Keterangan
Ketua Umum	Muiz Yurohmad	Ketua I & II
Sekretaris	Risky Indriyana	-
Bendahara	Anisa Dhifa Nirmalasari	Bendahara II
Kepala Seksi UEP	Ridha Hermawan	Anggota IV
Kepala Rekreasi, ODK	Sidik Nur Hadi	Anggota V
Kepala Seksi UKS	Dwi Sutrisno	Anggota II
Kepala Humas KDM	Hendri Nur Arbiyanto	Anggota IV
Sie PDP	Risti Dwi Prastiwi	Anggota III
Kepala LHP	Rachmad Bayu Aji	Anggota IV
Kepala KBM	Fajar Yuliani	Anggota III

*Sumber: RPJMKAL Girikerto Tahun 2021-2026*

Karang Taruna dari kelembagaan di atas berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan generasi muda di Kalurahan Girikerto.

**d. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)**

BUMDes/BUMKal merupakan lembaga kalurahan yang dibentuk atas inisiatif pemerintah kalurahan bersama masyarakat yang berstatus hukum tersendiri dan memiliki penanggung

jawab yang secara kelembagaan menjalankan program dari potensi lokal. Berikut kelembagaan BUMKAL Girikerto.

**Tabel 2.9**  
**Pengurus BUMKAL Girikerto**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Direktur	Rudi Pramoko S.Pd
Bendahara	Arum Fatwa Khoiria S.Pd
Sekretaris	Kurnia Azizah

*Sumber: RPJMKAL Girikerto Tahun 2021-2026*

Selain pengurus di atas, BUMKAL juga memiliki ketua penanggung jawab di setiap unit-unit usaha yang dimiliki oleh BUMKAL. Diantaranya di bidang Ekowisata Pancoh yang diketuai oleh Pak Natijan, Kampong Wisata Daleman Asri yang ketuai oleh Bapak Andri, Bumi Perkemahan Lembah Merapi oleh Pak Wagiman Listrik oleh Drs. Martono Teguh Pamuji, dan disetiap wilayah penanggung jawab pengelolanya di bantu oleh beberapa anggota bidang pelaksanaan peningkatan dan pengelolaan BUMKAL Girikerto. Selain hal-hal di atas, Girikerto juga memiliki kelompok-kelompok ternak yang coba difasilitasi agar memiliki daya dukung ekonomi, bukan hanya dari penjualan ternak tetapi juga dari sisi bisnis wisata edukasi dan produksi susu sapi yang kemudian dikembangkan menjadi berbagai produk kosmetik sampai produk yang dihasilkan dari pertanian salak.

## **E. Visi dan Misi Kalurahan Girikerto**

Visi dari Kalurahan Girikerto adalah sejahtera, mandiri, religius, berbudaya dalam lingkungan yang lestari.

1. Sejahtera merupakan keadaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik dalam kebutuhan lahiriah maupun batiniah yang di diperoleh secara merata. Ini bisa dilihat juga dalam indeks pembangunan manusia, menurunnya angka kemiskinan, menurunnya pendapatan-pendapatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata serta meningkatnya kesempatan kerja.
2. Mandiri merupakan suatu keadaan dari Kalurahan Girikerto dapat mendayagunakan potensi-potensi yang dimilikinya seperti dalam aspek Sumber Daya Alam (SDA), dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta Sumber Daya Sosial Budaya. Pada dasarnya pendayagunaan potensi dapat membawa perbaikan dari masalah yang dihadapi oleh Girikerto secara sistematis. Karena dengan mengidentifikasi peluang kebutuhan yang didukung dengan sarana dan prasarana perekonomian, akan menciptakan daya saing. Ini bisa dilihat dari peningkatan fasilitas infrastruktur yang di bangun serta banyaknya investasi yang masuk ke dalam kalurahan. Selain itu dapat juga dilihat dari peningkatan pendapatan kalurahan yang

nantinya dapat mencukupi keberlangsungan pemerintahan kalurahan atau masyarakat setempat.

3. Religius adalah perjalanan manusia dalam menerapkan nilai-nilai Agama yang diyakini oleh setiap warga di Kalurahan Girikerto sebagai bentuk rasa syukur dan tanggung jawab terhadap Sang Manunggal atau yang Tuhan yang Maha Esa. Pemerintah kalurahan dari Visi Religius merupakan upaya pengimplementasian toleransi antar beragama yang berdampak pada kerukunan dan menjaga stabilitas pemerintahan yang berjalan di tengah-tengah keberagaman beragama di Kalurahan Girikerto.
4. Berbudaya Dalam Lingkungan Lestari artinya adalah upaya pengkondisian masyarakat sadar dan terbina juga terdidik terhadap tatanan sosial yang kental akan nilai dan norma warisan para leluhur, sehingga tidak meninggalkan warisan budaya para pendahulu. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan warisan budaya (warisan berbeda dan tak benda), melibatkan peran masyarakat dalam bidang seni dan pelestarian kegiatan adat istiadat, sampai bisa melekat dalam keseharian hidup masyarakat Kalurahan Girikerto.

Sedangkan Misi dari Kalurahan Girikerto dalam mewujudkan Visi Girikerto di atas antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan penataan administrasi kalurahan.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengubah sistem pelayanan yaitu bukan hanya sekedar melayani tetapi juga berperan sebagai pamong yang melindungi dan menghormati serta memberi contoh/suri teladan di tengah-tengah masyarakat.
3. Penataan kinerja pamong yang mementingkan kepentingan umum bukan pada kepentingan golongan tertentu atau individu tertentu.
4. Mewujudkan masyarakat Girikerto yang aman dan kondusif.
5. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, dan dari bidang pariwisata serta meningkatkan BUMKal sebagai pelaksana dan administrator dalam mewujudkan usaha atau bisnis yang tertata dengan rapi.
6. Penataan pembangunan dengan skala prioritas yang dilihat dari kebutuhan, manfaat, dan dampak yang berkelanjutan.
7. Menggali potensi yang punya daya topang untuk kesejahteraan masyarakat di setiap wilayah untuk bisa diberdayakan menjadi sumber penghasilan warga.
8. Menjaga dan meningkatkan kelestarian alam
9. Menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama menuju masyarakat Girikerto yang menjunjung tinggi toleransi



10. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan terhadap keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
11. Meningkatkan kualitas pendidikan
12. Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menjalankan program bantuan kesehatan melalui fasilitas medis yang disediakan dan sarana pelayanan
13. Meningkatkan kualitas kepemudaan melalui wadah Karang Taruna.
14. Melestarikan budaya dengan menggelar kegiatan kebudayaan secara berkala dan terstruktur.

Visi dan Misi Kalurahan Girikerto di atas berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang disebut sebagai Nawacita kedua yaitu “Terwujudnya Indonesia manusia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Kemudian berpatokan juga pada Visi Pembangunan DIY yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah DIY No. 3 Tahun 2018 tentang RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu “terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja” dan yang terakhir berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 yaitu “Terwujudnya masyarakat sleman yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan, dan memiliki jiwa gotong royong.

## **F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikerto Tahun**

APBKal Girikerto adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah kalurahan untuk mengelola pendapatan dan belanja dalam rangka pembangunan guna mencapai visi dan misi Kalurahan. Program pembangunan disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan kalurahan yang dibagi menjadi lima bidang yaitu di bidang Penyelenggaraan Pemerintah desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa/kalurahan, bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan di bidang Pemberdayaan Masyarakat sampai bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak. Pembagian ini mencakup berbagai kegiatan dan upaya pembangunan yang yang akan direalisasikan di tahun berjalan, seperti halnya yang dicantumkan dalam Gambar 1.4 berikut.



Alokasi Dana Desa Rp 1.311.057.600, Dana Desa Rp 1.589.512.000,  
dan Bantuan Keuangan Provinsi Rp 3.246.646.000

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa proporsi pendapatan terbesar yang didapatkan oleh pemerintah kalurahan dari dana transfer. Dari anggaran yang didapatkan, APBKal Girikerto mengalami Surplus anggaran yang cukup besar. Pendapatan kalurahan sebesar Rp 7.565.973.000.00 kemudian dibelanjakan sebesar Rp 6.815.526.702.04. Jadi jumlah Surplus anggaran kalurahan Girikerto sebesar Rp 750.446.297.96

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Girikerto adalah kalurahan yang semenjak kemerdekaan hingga hari ini tidak pernah luput dari pergerakan membawa kemajuan di berbagai lini kehidupan masyarakat. Dalam perjalanannya membenah diri Girikerto mengalami beberapa fase perkembangan yang pesat, terutama dalam bidang peternakan dan pertanian salak. Pemerintah kalurahan berjalan dengan melihat perkembangan dua aspek ini selalu membawa daya tolong ekonomi, sehingga pemerintah memperhatikan bagaimana untuk bisa memberdayakan masyarakat yang secara umum menggeluti kesehariannya di kebun dan di kandang ternak. Sehingga pemerintah kalurahan cukup berhasil membawa masyarakat dengan menguasai bidang pertanian salak dan peternakan kambing Etawa dari hilir sampai hulu.

Perjalanan panjang perubahan yang mencoba mereformasi desa/kalurahan yang digambarkan diatas, bisa disimpulkan dengan analisis fakta yang penulis dapatkan di Girikerto. ada tiga hal yang melatarbelakangi terjadinya reformasi kalurahan Girikerto sehingga menghadirkan kemandirian, keberdayaan, dan pemberkuasaan walaupun terkadang sering dibelenggu dengan regulasi-regulasi dari pemerintah kabupaten. *Pertama*, pemerintah kalurahan dalam menjalankan berbagai regulasi yang telah dipertimbangkan bersama masyarakat atau bersama

BPKAL, masih bisa diintervensi dengan standar-standar administrative dari kabupaten, peran dari atas sangat besar sehingga apa yang menjadi prakarsa dan gagasan yang ada di visi dan misi kepala desa tidak bisa tercapai.

Ini bisa dilihat dari pola relasi yang di bangun oleh pemerintah kalurahan dengan pihak Supra Desa, lembaga-lembaga desa, dan masyarakat setempat. Titik tumpuan yang bermasalah hanyalah pada hubungannya dengan pemerintah daerah, hadirnya pemerintah supra desa memang tidak lagi menjadikan desa sebagai lokus atau objek kawasan yang bisa dijadikan ladang proyek sektoral yang ada di kabupaten ataupun di pusat akan tetapi pemerintah kabupaten hadir dengan gaya baru yang membatasi penggunaan desa dengan gaya kerja sama yang sebenarnya malah menyempitkan ruang lingkup kewenangan dan pergerakan peningkatan ekonomi yang berskala besar di Girikerto. Inilah yang kemudian disebut dengan Sinergitas intimidatif yang muaranya adalah menciptakan kepala desa yang konservatif

*Kedua*, pemerintah kalurahan dengan menumbuhkan Emansipasi Desa, menjadikan masyarakat sebagai basisi penghidupan yang membawa kemajuan ke arah kemandirian dan pemerintah kalurahan dalam menjalankan pembangunan dibidang 5 Arus pembangunan (5A). sudah cukup baik. Ini bisa dilihat dari bagaimana pemerintah kalurahan memfasilitasi warga masyarakat seperti halnya dalam penggunaan tanah

kas desa kepada masyarakat dalam membantu memfasilitasi usaha produksi dan aktivitas peternakan serta pelatihan dan pengarahan yang selalu direalisasikan oleh pemerintah kalurahan. Dan yang *Ketiga* adalah penyuntikan Dana yang membantu banyak hal dalam memajukan kebudayaan, pariwisata, UMKM, dan partisipasi perempuan dan pemuda di Girikerto. keaktifan berbagai macam modal sosial ini bisa dilihat dari peran pemerintah yang berkolaborasi dengan para tokoh masyarakat untuk membentuk puluhan kelompok organisasi yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi di kalurahan Girikerto. sehingga pergerakan kekuatan sosial bisa mewujudkan apa yang menjadi nilai-nilai keyogyakartaan yaitu hidup, kehidupan dan penghidupan.

## **B. Saran**

Pemerintah harus melihat beberapa aspek pendirian prinsip yang dipegang oleh pemerintah kalurahan supaya tidak mudah terjebak dengan berbagai macam kepentingan yang dibungkus dengan pendekatan kerja sama oleh para supra desa. Pemerintah kalurahan jangan memandang kemandirian dari konsep kesendirian. Artinya jangan mengandalkan segala sumberdaya di desa sebagai dasar satu2nya dalam mencapai kemandirian. Karena kemandirian tidaklah jalan sendiri. Maka maknailah kemandirian dari aspek Emansipasi yaitu pembebasan dari dominasi yg menimbulkan persamaan hak dalam memberi manfaat dengan bergelut dan membenah diri bersama masyarakat yang disupport oleh Negara.

PKK dalam perjalanannya di Girikerto, hanya dianggotai oleh kalangan Ibu-ibu saja. Padahal secara substansial berbicara kesejahteraan keluarga perlunya pemahaman juga kepada kepala rumah tangga untuk bisa sadar atas pembagian peran dalam lingkungan sosial. Di Kalurahan Girikerto pergerakan Ibu-ibu membelenggu pemahamannya sendiri hanya sampai pada kalangan wanita atau perempuan semata. Padahal peran utama dalam peningkatan kesejahteraan membutuhkan peran kepala rumahtangga. Ruang gerak PKK Ini memang tidak terlepas dari program beberapa fungsi utama PKK yang sangat mengikat, Namun tidak menjadi hambatan jika pergerakan PKK dikolaborasi dengan kepala rumah tangga atau kalangan bapak-bapak. Sehingga perlunya pemberian pemahaman dari pemerintah kalurahan atas hal ini.



## Daftar Pustaka

### Buku :

- Sumarjan, S. (2009). *Perubahan Sosial Di Yogyakarta (2)*. Komunitas Bambu.
- Eko, Sutoro, & Dkk. (2013). *Mutiara Perubahan Inovasi dan Emansipasi Desa Dari Indonesia Timur*. I. Yogyakarta. ACCESS Phase II dan IRE Yogyakarta
- Eko, Sutoro, & Dkk. (2014). *Desa Membangun Indonesia (I)*. FORUM PENGEMBANGAN PEMBAHARUAN DESA (FPPD).
- Eko, Sutoro., & Dkk. (2005). *Manifesto Pembaharuan Desa (I)*. APMD PRESS.
- Eko, Sutoro (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru, ide, misi, dan semangat uu desa (pertama)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Eko, Sutoro dkk. (2005). *Manifesto Pembaharuan Desa (I)*. APMD PRESS.
- Eko, Sutoro (2013). *Daerah Inklusif. Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: IRE
- Eko, Sutoro dkk. (2014). *Desa Membangun Indonesia (I)*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Eko, Sutoro dkk. (2017). *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STPMD “APMD.”
- Thoha, Miftah. (2014). *Birokrasi: Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Farid, Hilmar. (2017). *Sumber Sejarah Lisan Revolusi Hijau Di Indonesia*. yogyakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Skinner, Quentin. (1978). *The Foundations of Modern Political Thought*. Cambridge:Cambridge University Press.
- Skinner, Quentin. (2009). “A Genealogy of the Modern State”. *British Academy*.162.
- Joss C.N Raadschelders, (2020).*The Three Ages Of Government*

Muqowam. A, (2021). *Membangun Atau Merusak Desa*. Jakarta. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (pertama). Alfabeta.

Triputra, Dr. R. Widodo. (2019). *Regulasi Desa*. I. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Mahfud, MD, M. (2000). *Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa (Parlemen Desa, Demokratisasi, dan Beberapa Persoalan Hukum)*. II. Yogyakarta. Laper Pustaka Utama (Yayasan Laper Indonesia).

### **Peraturan Perundang Undangan :**

Pemerintah Indonesia (1979). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa*.

Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7. Jakarta: Sekretariat Negara

Gubernur DIY. (2021). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021, Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan*.

Gubernur DIY. (2020). *Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 364 Tahun 2020, Tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya*

Peraturan Bupati Sleman No 11.1 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati No 22.1 Tahun 2019 tentang biaya operasional dan besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa/Kalurahan

Pergub DIY No.37/2022 tentang pedoman pelaksanaan dana istimewa kepada pemerintah kalurahan

Dekrit pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah kalurahan di Yogyakarta

maklumat pemerintah DIY Tahun 1946 mengenai pemerintah kalurahan

**Jurnal :**

- Eko, S. (2021). *Government Making: Rebuilding Government Science*. 2(1), Governabilitas, Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta
- Surida, A. (2022). Menghadirkan Pemerintah Untuk Warga. Yogyakarta. Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta). V3i.1115 2022
- Huntington, Samuel. "The United State", dalam M.J Crozier, S. Huntington, J. Watanuki, (1975) *The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission*. New York: New York University Press.
- Supardal, Triputro, W., & Pribudi, A. (2022). *Cultural-Independent Village: Towards Village Autonomy in a Cultural and Tourism Village in Yogyakarta*. Vol. 9, No. 8, Tahun 2022. Jurnal International Journal of Social Sciences and Humanities Invention
- Ahmad, F., Fitriani, F. L., & Kurniawan, I. ddk (2021). *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020* Vol, 564. No. 2, Tahun 2021. Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora
- Hendra, O., Janah, M. M., & Indriani, D. (2022). *Desa Panggungharjo Yogyakarta: Sebuah Praktik Terbaik Dari Reformasi Tata Kelola Desa*. Vol. 14, No 1, Tahun 2022, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah
- Harjo, B. (2017). *Model Membangun Desa Mandiri*. Vol. 2, No. 1, Tahun 2017, Jurnal Sosial Dan Humanis Sains
- Prasetyanti, R., & Kusuma, B. M. A. (2020). *Quintuple Helix dan Model Desa Inovatif (Studi Kasus Inovasi Desa di Desa Panggungharjo, Yogyakarta)*, Vol. 16, No. 3, Tahun 2020, Jurnal Borneo Administrator
- Waruwu, V. T. S. (2021.). *Narasi Perubahan Kelurahan Panggungharjo Dibawah Kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi*, (Skripsi). Yogyakarta:APMD
- Syahbana, M. N. (2022). *Inovasi Dalam Reformasi Birokrasi Di Kelurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul*, (Skripsi). Yogyakarta:APMD
- Septiyanto, D. (2022). *Reformasi Birokrasi Di Kelurahan Panggungharjo*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2021, Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta
- Junarto, R., & Salim, M. N. (2022). *Strategi Membangun Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Bukti Dari Gunung Sewu Geopark, Indonesia*. Vol. 5, No. 2, Tahun 2022, Jurnal Tunas Agraria

Marianata, A., & Handayani, Y. (2019). *Retrospeksi Reformasi Desa*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2019, Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik. Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik

Amaliah, Ayu Diah, dan Syawie, M. (2015) *Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi*. Vo, 1. No. 02, Tahun 2015, Sosio Informa.

Ra'is Deki Umamur, (2017). *Kebijakan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Vol. 7, No. 1, Reformasi.

Putri, Lia Sartika, (2016). *Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa Dalam (Village Authority And The Issuance Of village Regulation)*, Vol. 13, No. 02, Jurnal Legislasi Indonesia

**Lain-Lain :**

<https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/474737/binaan-diskop-ukm-diy-kalurahan-girikerto-jadi-desamandiri-budaya-terbaik-2022>

<https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/474737/binaan-diskop-ukm-diy-kalurahan-girikerto-jadi-desamandiri-budaya-terbaik-2022>) di akses tanggal 02-03-2023 pukul 12:23

<https://www.youtube.com/watch?v=brsE9k9npS0>. Tahta Untuk Rakyat: Reformasi Kalurahan Daerah Istimewa Yogyakarta (2022)

<https://www.youtube.com/watch?v=pxXZzz2LErU>. Kuliah Umum | Reformasi Kalurahan | KPH.H. Yudanegara, Ph.D & Dr. Sutoro Eko Yunanto.(2022)

<https://www.youtube.com/watch?v=f2Xaix36Cgg>. Rekognisi dan Emansipasi Desa

<https://www.youtube.com/watch?v=GHOwFbQKi2Y>. Reformasi Desa.(2023)\

*Sumber: Rolling B.P, 2019*

*Sumber: Girikerto.Sid.slemankab.go.id.2022*

<https://girikertosid.slemankab.go.id/first/artikel/58>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hasil dokumentasi berupa foto-foto wawancara dengan informan selama penelitian.

### Dokumentasi bersama pelaku-pelaku UMKM



### Dokumentasi bersama ataf-staf pemerintahan Kalurahan Girikerto



Bersamai pemerintah kalurahan dalam penandatanganan MOU



Bersama Pak Carik mengunjungi wisata Salak Kalurahan Girikerto



Ngobrol progresif bersama pgiat ternak kambing



Bersama Pak Agus Tri Wibowo S.Kom





Dokumentasi bersama  
Pak Samirin Kaur  
Pangripta



Dokumentasi bersama Ibu  
Endang Ketua kelompok  
tani dan pengembangan  
inofasi pertanian salakdi  
kalurahan girikerto